

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Latif Maulana Razak
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	1 Dokumen
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	1 Dokumen
	Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	1 Dokumen
	Jumlah layanan umum kelembagaan	1 Layanan
	Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Perencanaan dan Keuangan	
Output 1: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 7.800.000
Output 2: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 7.200.000
Output 3: Layanan Manajemen Keuangan	Rp 5.700.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Umum	Rp 365.121.000
Output 2: Layanan Perkantoran	Rp 139.832.543.000
Total	Rp 140.218.364.000

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	1 Dokumen	Merupakan jumlah dokumen yang dihasilkan pada Layanan Perencanaan dan penganggaran, terdiri atas: a) Renja K/L 2027; b) Revisi Renja 2026; c) RKA-K/L 2027; d) Revisi RKA-K/L 2026; e) Perjanjian Kinerja 2026; dan f) Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) 2027.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Berdasarkan jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	1 Dokumen	Merupakan jumlah dokumen yang dihasilkan pada Layanan Pemantauan dan Evaluasi, terdiri atas: a) Laporan Triwulan I; b) Laporan Triwulan II; c) Laporan Triwulan III; d) Laporan Triwulan IV;	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Berdasarkan jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			e) Laporan Tahunan 2025; f) Laporan Kinerja 2025.		
	Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	1 Dokumen	Merupakan jumlah dokumen yang dihasilkan pada Layanan Manajemen Keuangan , terdiri atas: a) 12 Laporan pertanggungjawaban bendahara; b) 12 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; c) 3 Laporan keuangan yaitu laporan keuangan Unaudited, Audited dan Semester I; dan d) 1 Laporan PIPK	Dokumen Perbendaharaan, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Akuntansi Pelaporan	Berdasarkan jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan yang disusun
	Jumlah layanan umum kelembagaan	1 Layanan	Merupakan jumlah layanan umum atas dukungan Penguatan Kelembagaan dalam bentuk fasilitasi fungsi pengawaan penyelenggaraan pelayanan publik terkait perencanaan, pengelolaan keuangan dan pemantauan serta evaluasi kinerja	Laporan Kegiatan Dukungan Penguatan Kelembagaan	Berdasarkan jumlah layanan umum kelembagaan yang diberikan selama 1 tahun
	Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1 Layanan	Merupakan jumlah layanan atas komponen yang melekat pada Layanan Perkantoran Biro Perencanaan dan keuangan, terdiri atas: a) Gaji dan Tunjangan; dan b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Data Pengelolaan Gaji, Tunjangan, dan Operasional	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional yang diberikan selama 1 tahun